

TAJUK RENCANA

Digitalisasi Keuangan Masjid

MASJID, selain sebagai tempat ibadah sebenarnya juga merupakan tempat pengumpulan dana umat. Minimal dana infak, karena umumnya masjid menyediakan kotak infak. Selain itu ada dana keagamaan lain, misalnya sedekah, zakat dan mungkin wakaf uang. Hasil pengumpulan dana tersebut di setiap masjid memang berbeda-beda, banyak yang hanya ratusan ribu rupiah perminggu (tiap Jumat), namun untuk masjid besar bisa mencapai angka lebih dari satu juta rupiah. Kalau bisa dikonsolidasikan, misalnya dari masjid-masjid se-DIY, akumulasi hasil pengumpulan dana tersebut angkanya pasti luar biasa.

Sebagaimana dikatakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah DIY Prof Dr Muhammad MAg CIRBCom, jumlah masjid di DIY sekitar 7.000 (KR, Kamis 18/2). Kalau rata-rata setiap masjid mengumpulkan infak Rp 100.000 setiap minggu, misalnya, maka kalau dikalikan 7.000 masjid akumulasinya Rp 700.000.-000. Sedang jika satu bulan (Rp 700.000.000 X 4), maka jumlahnya mencapai Rp 2.800.000.000 sebuah angka yang luar biasa. Padahal realitasnya bisa lebih dari angka itu.

Hanya saja masalahnya, selama ini pengelolaannya kebanyakan masih konvensional. Juga belum pernah dikonsolidasikan. Karena itu perlu mulai dipikirkan perlunya melakukan digitalisasi keuangan masjid. Untuk itu upaya Bank BPD DIY Syariah membantu digitalisasi keuangan masjid perlu diapresiasi.

Sebagaimana diketahui, para bendahara masjid masih berbeda-beda dalam mengelola keuangan. Ada yang disimpan di almari (khususnya di desa-desa), ada juga yang menyimpan di lembaga keuangan terdekat. Biasanya setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup untuk suatu kebutuhan baru ditasarlukan (digunakan). Kecuali Masjid Jogokariyan yang

menerapkan saldo 0 persen. Artinya, infak yang masuk langsung ditasarlukan semua (kebetulan jumlahnya juga lumayan).

Untuk itu memang perlu dilakukan pelatihan bagi para takmir masjid, khususnya bendahara. Hal ini sesuai dengan tuntutan zaman yang kian berkembang di era digital ini. Apalagi umumnya mereka sudah mempunyai sarana digital, termasuk jaringannya. Digitalisasi ini bukan hanya dalam pengelolaannya, tetapi dalam penerimaannya, sehingga tidak hanya tergantung pada kotak infak yang dipasang di masjid. Dengan begitu juga akan lebih aman, karena tidak ada pencurian kotak infak.

Dengan digitalisasi keuangan masjid maka akan lebih cepat, tepat, akurat, dan transparan dalam bertransaksi. Jangkauan sumber dana juga lebih luas dan banyak, sumber penerimaan masjid lebih optimal, penerimaan dan pengeluaran terkontrol serta manajemen keuangan masjid tertata sehingga mempermudah pertanggungjawabannya. Sebab, yang dikelola ini merupakan dana umat dan pengelola harus mempertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat.

Untuk itu memang perlu dilakukan pelatihan secara massal (se-DIY bisa bertahap) bagi para takmir masjid. Di sini peran berbagai pihak dibutuhkan, misalnya peran Dewan Masjid Indonesia (DMI) dengan jaringannya yang ada sampai tingkat kecamatan (Kapanewon). Juga dari lembaga keuangan perbankan untuk memberikan pelatihan sekaligus infrastruktur yang dibutuhkan, misalnya dengan kantor kas atau loket tempat penerimaan simpanan uang infak yang masuk dan untuk pengambilan uang secara mudah jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Para takmir masjid se-DIY kiranya siap menerima program ini. Untuk itu ditunggu peran pihak-pihak terkait untuk merealisasikan. □

DPR dan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Serentak 2024 mendatang. Sejak 2014 lalu, pemerintah telah merencanakan penyelenggaraan pemilu serentak nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setidaknya, pilihan kebijakan ini didasarkan pada realitas anggaran pemilu yang cukup besar, baik sebagai logistik pemilu maupun gaji penyelenggara dan pengawas pemilu.

Selain itu, pemilu tingkat pusat dan daerah, yang diselenggarakan setiap tahun, mengurus banyak energi pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara sendiri. Belum lagi potensi konflik yang cukup mengkhawatirkan. Tentu ada cukup banyak isu substantif yang patut diperdebatkan, karena memang pemilu Indonesia sedang dalam perjalanan menemukan jati dirinya yang melindungi demokrasi sekaligus mengakomodir nilai-nilai keindonesiaan. Misalnya perdebatan klasik *presidential threshold* atau *parlementer threshold* dalam konteks penyederhanaan partai politik, calon perseorangan baik presiden maupun kepala daerah, calon tunggal presiden dan kepala daerah. Lalu bagaimana desain pemilu serentak nasional yang hendak dipilih?

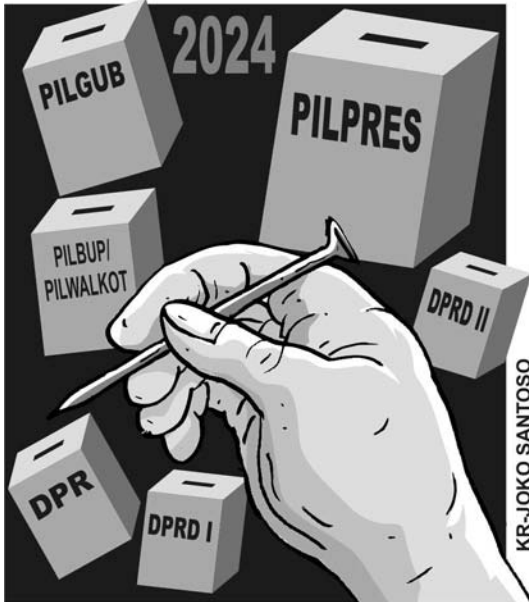
Pilihan Model

Ada beberapa pilihan model yang bisa dilakukan. Pertama, pilihan atas pemilu yang benar-benar serentak dalam artian bersamaan pada tingkat pusat dan daerah, baik eksekutif maupun legislatif yaitu: presiden, gubernur, bupati/walikota, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Model ini sekalipun jauh lebih menghemat dana dan mempersingkat waktu, namun justru meninggalkan banyak masalah, dari aspek teknis dan substantif.

Pada Pemilu 2019 lalu, yang hanya memilih DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden, menyisakan persoalan. Menurut data KPU 894 petugas pemilu meninggal dunia. Dapat dibayangkan kondisi yang akan terjadi apabila ditambah pula dengan pemilihan-

Despan Heryansyah

an gubernur, bupati, dan walikota. Dari aspek substantif, kertas suara yang begitu banyak tidak saja membingungkan pemilih, namun juga merugikan calon yang bisa saja kehilangan suara karena nama dan gambarnya tidak begitu tampak.



KR-JOKO SANTOSO

Kedua, pilihan berikutnya adalah membagi pemilu menjadi dua yaitu pemilihan legislatif pada satu waktu dan pemilihan eksekutif pada waktu yang lain. DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan dipilih pada satu waktu bersamaan. Kemudian tahun berikutnya akan memilih presiden, gubernur, bupati/walikota. Pilihan ini cukup rasional bukan saja karena akan mengurangi risiko kesehatan yang selama ini dikhawatirkan. Tapi juga diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan politik antara presiden dengan kepala daerah seperti selama ini.

Ketiga, pilihan ini adalah membagi pemilu menjadi dua atau tiga tingkatan, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah. Tingkat pusat adalah pemilihan presiden dan DPR RI dalam waktu

bersamaan. Kemudian pada tahun berikutnya pemilu tingkat daerah yaitu kepala daerah dan DPRD, yang dapat dilakukan bersamaan atau dipecah lagi menjadi dua klaster yakni pemilihan gubernur dan DPRD Provinsi lalu pemilihan bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota. Membagi pemilu menjadi tingkat nasional dan lokal ini mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan pilihan model yang lain.

Tertunda

Sayangnya, RUU yang hangat menjadi pembicaraan ini harus tertunda karena fraksi di DPR berbeda pendapat. Sebagian ingin meneruskan pembahasan, namun sebagian yang lain memilih menunda agar pemerintah dapat fokus pada penanganan pandemi covid-19. Argumentasi ini cukup rasional, namun rasanya cukup berlebihan karena penyelenggaraan pemilu adalah masalah substansial yang juga harus dilindungi.

Namun poin yang harus kita kawal bersama adalah kran partisipasi masyarakat harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai suatu RUU muncul tiba-tiba dan langsung disahkan sebagaimana yang belakangan ini terjadi. Dari aspek moralitas dan filosofis, partisipasi rakyat adalah legitimasi keabsahan suatu undang-undang, sekalipun kita menganut demokrasi perwakilan. □

***) Dr Despan Heryansyah SHI SH MH**, peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirinkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengis subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

 pikiranpembaca@gmail.com  0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Optimalkan Jalur SNMPTN

SETELAH ditetapkan sebagai siswa yang memenuhi syarat (eligible) untuk mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP), kini sebagian siswa SMA/MA/SMK tengah bersiap melakukan pendaftaran lanjutan pada tanggal 15-24 Februari 2021. SNMPTN merupakan salah satu jalur masuk Perguruan Tinggi Nasional (PTN) selain Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan seleksi mandiri. SNMPTN adalah seleksi nasional masuk PTN menggunakan nilai rapor dan prestasi/portofolio yang dimiliki siswa tanpa ujian atau seleksi tertulis.

Penjaringan awal peserta SNMPTN melalui beberapa ketentuan di antaranya dimilikinya Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang ada pada website NISN dan telah diunggahnya nilai rapor semester 1 sampai 5 (bagi siswa SMA/SMK/MAK tiga tahun) atau nilai rapor semester 1 sampai 7 (bagi SMK/MAK empat tahun) yang telah diisikan pada PDSS. Kualifikasi akreditasi sekolah turut menentukan jumlah siswa yang lolos pada tahap awal, yaitu 40 % dari jumlah siswa bagi sekolah yang terakreditasi A, 25 % jika kualifikasi akreditasi B dan 5 % bagi sekolah yang memiliki kualifikasi akreditasi C. Beberapa mata pelajaran menjadi indikator dalam pemeriksaan nilai siswa sesuai jurusan masing-masing, namun demikian mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menjadi indikator umum pemeriksaan untuk semua jurusan baik IPA, IPS, MA maupun SMK.

Proses lanjutan bagi peserta SNMPTN adalah pendaftaran dan pemilihan program studi (prodi). Diawali dengan login ke laman SNMPTN, mengisi data diri dan orang tua/wali, mengisi pilihan PTN dan prodi, mengunggah pas foto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada), mengunggah portofolio dan dokumen bukti

keterampilan yang disahkan oleh kepala sekolah bagi pendaftar prodi keolahragaan dan seni serta dikahiri dengan mencetak kartu bukti pendaftaran.

Pada pemilihan prodi siswa hanya diperbolehkan memilih paling banyak dua prodi yang salah salah satu prodinya harus berada pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asal siswa. Selain itu, beberapa ketentuan lain turut menjadi filter lolos tidaknya di jalur SNMPTN adalah tentang urutan PTN dan prodi sebagai prioritas pilihan, relevansi jurusan dengan pilihan prodi serta aturan tambahan lain sesuai karakter PTN (misal syarat tidak buta warna, surat keterangan tidak hamil).

Nilai rerata raport yang dimiliki setiap siswa, turut menjadi salah satu indikator dan kunci sukses yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena Standar Ketuntasan Minimal (SKM) setiap sekolah tidaklah sama, tentulah PTN tidak serta merta hanya melihat besaran nilai reratanya, tapi disesuaikan dengan peringkat pada sekolah yang dikeluarkan nilai. Hal yang sering menjadi dasar pertimbangan lain adalah track record alumni yang diterima di PTN yang dituju, baik dari sisi jumlah, prestasi maupun konsistensi para alumni dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan PTN (siswa yang lolos seleksi pasti melakukan registrasi).

Hal penting yang tidak boleh dianggap remeh adalah pastikan memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Jika siswa yang dinyatakan lolos dalam SNMPTN namun tidak melakukan pendaftaran ulang karena tidak adanya minat, maka secara otomatis siswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti SBMPTN. Pertimbangan secara matang dan mantab agar jika dinyatakan lolos tidak ada lagi keraguan untuk mendaftar ulang dan siap menjalani perkuliahan dengan penuh kesungguhan agar dapat meraih prestasi gemilang demi masa depan yang cemerlang. □

***) Nurlaila Mahmudah**,
Guru Matematika SMKN 3 Yogya.

SEPULUH tahun lalu sempat mengemukakan diskusi terkait Regional Champion Bank (RCB). Diskusi publik dan akademik RCB dikaitkan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Saat itu diharapkan Bank BPD mampu menjadi RCB. Bahkan Bank Indonesia (BI) meluncurkan program BPD Regional Champion (BRC). Sebagian besar sudah menjadi RCB/BRC dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerahnya.

Untuk dapat menuju ke RCB/BRC setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan dan dipenuhi. Pertama, ketahanan kelembagaan/institusional yang kuat. Dalam hal ini Bank BPD harus berkomitmen untuk meningkatkan modalan, meningkatkan efisiensi guna mencapai tingkat profitabilitas yang memadai. Sehingga dapat memberikan kredit dengan suku bunga yang kompetitif kepada masyarakat.

Program Standarisasi

Kedua, mampu berperan sebagai *agent of regional development*. Bank BPD wajib menargetkan pangsa yang lebih besar untuk kredit pada sektor-sektor produktif dan meningkatkan fungsi intermediasi, khususnya untuk UMKM. Untuk itu diperlukan kerja sama/kemitraan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik melalui *linkage* program maupun menjadi Apex bank (bank pelindung).

Ketiga, meningkatkan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. Bank BPD harus memiliki program standarisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di samping itu, diperlukan perluasan jaringan kantor untuk mendukung terwujudnya sistem keuangan yang inklusif.

Dalam perkembangannya Bank BPD juga mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) : Bank BPD Syariah. Dari 26 Bank BPD di seluruh Indonesia, sejum-

Y Sri Susilo

lah 13 Bank BPD mempunyai UUS, termasuk Bank BPD DIY Syariah. Untuk Bank BPD DIY Syariah, 19 Februari 2021 telah berusia 14 tahun.

Perjalanan Bank BPD Syariah DIY selama ini tentu berkontribusi pembangunan ekonomi di DIY pada umumnya, serta perbankan syariah pada khususnya. Penyaluran pembiayaan BPD DIY Syariah selama ini banyak mendukung sektor produktif, termasuk UMKM. Selain juga membantu rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah, dan berbagai kepentingan usaha masyarakat lainnya. Layanan Bank BPD DIY Syariah juga mencakup deposito, giro, tabungan, juga tersedia layanan *mobile banking*.

Bank BPD DIY Syariah juga dipercaya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalankan empat fungsi. Yaitu fungsi setoran biaya penyelenggaraan dan perjalanan haji, fungsi pengelola dana manfaat, fungsi bank penempatan, dan fungsi bank mitra investasi. Berbagai prestasi diraih Bank BPD DIY Syariah. Penghargaan Majalah Investor Bank Syariah Terbaik (Best Syariah 2020) kategori modal di bawah Rp 2 triliun. Penghargaan lain The Best Asset Quality Sharia Business Unit Commercial Bank 2020 dan The Most Efficient Sharia Business Unit Commercial Bank 2020.

Pemisahan

Sejalan berkembangnya Bank BPD DIY Syariah telah siap melakukan pemisahan dari UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada 2023 sesuai amanat UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Terkait dengan hal tersebut,

Bank BPD DIY Syariah juga terus melakukan inovasi, baik dari sisi produk layanan atau produk pembiayaan, termasuk layanan digital.

Mampukah Bank BPD DIY Syariah sebagai RCB Syariah? Jawabnya adalah bukan suatu impian. Untuk menjadi RCB Syariah tentu harus memenuhi 3 hal, yaitu (1) memiliki ketahanan kelembagaan perbankan syariah yang kuat.

(2) Memiliki kemampuan bertumbuh dan berkembang dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi syariah. (3) Memiliki kemampuan pelayanan perbankan syariah yang optimal.

Perbankan syariah bukan hanya diperuntukkan bagi umat muslim. Di masa mendatang masyarakat non-muslim diharapkan semakin banyak yang bisa menikmati layanan perbankan syariah. Selamat Milad ke-14 Bank BPD Syariah DIY. □

***) Dr Y Sri Susilo**, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. Artikel kerja sama KR - Bank BPD DIY Syariah

Pojok KR

Hujan deras landa DIY-Jateng.
-- Cuaca ekstrim masih perlu diwaspadai.

Usai divaksin, Wapres tak rasakan efek.
- Jadi, tidak perlu takut divaksin.

WO keluhkan pungi event pernikahan.
-- Penyakit lama yang belum juga hilang.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkyk23@yahoo.com, iklandrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu" Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm klm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d SI, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.